

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika politik dalam bingkai demokrasi menunjukkan dinamika yang semakin dinamis. Perubahan dinamika politik yang mengarah pada situasi dan kondisi dimana persaingan perebutan kekuasaan di semua level pemilu (pemilukada, pileg mulai dari DPR-RI, DPRD, DPD-RI, hingga pemilihan Presiden dan wakil Presiden).^{1,2} relative dapat berjalan secara terbuka dan sportif. Hal inilah yang membuka peluang bagi masuknya relasi kuasa dalam dunia politik.

Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana salah satu bentuk pengaplikasian demokratis yaitu dengan diadakannya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang digunakan masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³ Adanya pemilu menjadikan masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dalam pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui pemilu memungkinkan dari semua pihak bisa diserap bahkan di terima apa yang diinginkan dan di cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Untuk mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat, sistem pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui Amandemen UUD NKRI

¹ Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*.

² Abdul, "DINAMIKA POLITIK PRA DAN PASCA PEMILU 2024."

³ Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan."

1945 dengan tambahan pasal 6A dan pasal 22E sistem pemilu yang sebelumnya diubah menjadi sistem pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁴

Pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana perwujudan keadilan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai partai pemilu dinilai akuntabelitas setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang di dasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik, mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.⁵

Kandidat politik yang ikut pemilu dilahirkan oleh partai politik, pada pemilu partai politik tidak hadir sendirian terdapat lawan-lawan politik yang juga memiliki tujuan sama untuk berkuasa. Partai politik dan calon kandidat perlu memonitor dan mengevaluasi setiap strategi dan aktipitas yang dilakukan partai lain layaknya

⁴ Bruce, "Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

⁵ Harjono, "Pemilu Sebagai Pesta Kebudayaan."

prinsip zero sum setiap kemenangan satu pihak merupakan kekalahan dari pihak lain. Setiap partai politik maupun kandidat politik harus memiliki strategi agar memperoleh elektabilitas yang tinggi sehingga sebuah tujuan akan tercapai.

Relasi Kuasa merupakan salah satu kunci kemenangan seorang calon atau kandidat dan merupakan peranan penting dalam kemenangan. Keberhasilan untuk memenangkan pemilihan umum legislatif tidak lepas dari latar belakang keluarga, kekuasaan terdahulu, dan pengaruh tokoh elit politik. Sehingga upaya melakukan persuasi terhadap masyarakat pemilih harus terus dilakukan, yang pada akhirnya memberikan dukungan suaranya untuk memilihnya.⁶ Relasi Kuasa merupakan seperangkat mode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal ini imbas dari reformasi yang terjadi dimana proses politik menjadi lebih dinamis, hingga akhirnya dibutuhkan suatu kekuatan politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.

Michel Foucault mengatakan Relasi Kuasa adalah hubungan yang terbentuk antara individu, kelompok, atau institusi dalam konteks pengaruh dan kontrol terhadap sumber daya, keputusan, atau tindakan. Dalam masyarakat, kekuasaan sering kali dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik melalui otoritas formal seperti yang terlihat pada pemerintahan atau lembaga, maupun secara informal dalam hubungan sosial dan ekonomi.⁷

⁶ Agung, "Relasi Kuasa."

⁷ Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)."

Dalam studi sosial, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang atau kelompok, tetapi juga sebagai sesuatu yang dinamis dan dapat berubah-ubah tergantung pada konteks, struktur sosial, dan situasi politik. Filsuf seperti Michel Foucault melihat kekuasaan bukan hanya sebagai alat dominasi, tetapi sebagai jaringan hubungan yang tersebar diseluruh aspek di kehidupan sosial. Kekuasaan berkerja melalui mekanisme wacana, insitusi, dan norma-norma sosial yang mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok bertindak.⁸

Selain itu Relasi Kekuasaan sering kali di kaitkan dengan isu-isu ketimpangan sosial. Dibanyak masyarakat, distribusi kekuasaan tidak merata sehingga menciptakan hierarki yang memperkuat dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Hal ini dapat terlihat dalam konteks politik, ekonomi, gender, ras, dan kelas sosial. Misalnya kelompok elit politik mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik, orang-orang yang memiliki latar belakang keluarga penguasa sering kali memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan masyarakat biasa dalam konteks budaya communiti primer.⁹

Relasi Kausa adalah taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan -tujuan politik, baik dalam konteks pemilu, atau upaya memperkuat kekuasaan dan pengaruh dalam sistem pemerintahan. Dalam sebuah demokrasi modern, relasi politik memiliki peran yang sangat penting karena setiap aktor politik (politisi, lembaga pemerintahan, dan masyarakat sipil.) berusaha untuk memaksimalkan

⁸ Sunaryo, "(Inter-) Relasi Kekuasaan Dan Kebenaran Menurut Michel Foucault."

⁹ Dwi MaarifSyamsul, "Relasi Kekuasaan Dalam Masyarakat."

dukungan, mengendalikan narasi publik, dan mencapai hasil yang diinginkan.

Beberapa faktor relasi kuasa yaitu:

1. Kontrol dan dominasi: seseorang mungkin menggunakan kekuasaan untuk mengontrol situasi atau orang lain. Hal ini sering terjadi ketika seseorang ingin mendominasi atau mempertahankan posisi superioritas dalam suatu kelompok atau organisasi.
2. Tujuan pribadi: kekuasaan sering digunakan untuk mencapai tujuan pribadi, seperti mendapatkan keuntungan ekonomi, politi, atau sosial. Seseorang mungkin menggunakan kekuasaan untuk memastikan kepentingannya atau agendanya terlaksana.
3. Keamanan dan Perlindungan: orang mungkin menggunakan relasi kekuasaan untuk melindungi dirinya sendiri atau kelompoknya dari ancaman eksternal baik fisik maupun simbolis. Kekuasaan dapat digunakan sebagai alat pertahanan.
4. Pengaruh Sosial: dalam banyak situasi, seseorang menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan orang lain. Ini bisa terjadi dalam konteks kepemimpinan, manajemen, atau hubungan antar pribadi.
5. Legitimasi dan Otoritas: seseorang yang memegang kekuasaan formal atau diakui secara sah (seperti dalam organisasi, pemerinthan, atau masyarakat). Akan cenderung menggunakan kekuasaan sebagai bagian dari kewajibannya untuk memimpin atau mengatur.
6. Ketidaksetaraan sosial: kekuasaan sering di gunakan untuk mempertahankan atau memperbesar ketidak setaraan sosial. Mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mengatur distribusi sumber daya tersebut demi mempertahankan status QUO.
7. Kepercayaan Diri: orang yang percaya pada kemampuan dan otoritasnya lebih mungkin menggunakan kekuasaan untuk menegaskan pandangan atau kebijakannya, terutama jika ia merasa bahwa ia memiliki hak atau kewajiban untuk melakukannya.

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, atau politik dimana kekuasaan itu digunakan.

Studi tentang Relasi Kekuasaan penting untuk memahami dinamika sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana kekuasaan didistribusikan, dipertahankan, atau ditentang. Relasi kekuasaan juga memengaruhi kebijakan publik, interaksi antar individu, dan struktur institusi. Pemahaman yang mendalam mengenai relasi kekuasaan membantu dalam mengidentifikasi ketidakadilan dan merumuskan strategi perubahan sosial yang lebih inklusif.¹⁰

Dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk seiring dengan tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Selain itu untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan ditingkat pusat serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah. Maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada november 2001.¹¹

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Tugas utama DPD adalah memberikan masukan terkait rancangan undang-undang yang berhubungan dengan daerah,

¹⁰ Joni, "Relasi Modal Dan Kekuasaan Politik."

¹¹ Safa'at, "DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah."

hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, pengabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah.

Struktur anggota DPD, anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Setiap Provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 (empat) anggota DPD, sehingga jumlah total anggota DPD mencerminkan jumlah provinsi di Indonesia dikalikan 4 (empat). Anggota DPD tidak bersal dari partai politik, melainkan individu-individu yang mencalonkan diri secara independen.¹²

Perbedaan dengan DPR, DPD berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif yang lebih berfokus pada perwakilan politik melalui partai politik. DPD lebih berperan dalam memperjuangkan isu-isu daerah. DPD tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi. DPD hanya memberikan rekomendasi dan pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap berada ditangan DPR. Pembentukan DPD diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan daerah dalam pengambilan keputusan ditingkat nasional dan memperkuat otonomi daerah di Indonesia.¹³

Syarat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai berikut:

¹² “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.”

¹³ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Perbedaan DPD Dan DPRD.”

1. Warga Negara Indonesia (WNI) calon harus merupakan WNI yang telah terdaftar sebagai pemilih.
2. Berusia minimal 21 tahun: pada saat pendaftaran, calon harus berusia minimal 21 tahun.
3. Pendidikan Minimal: memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat.
4. Tidak pernah didana: calon tidak boleh pernah di hukum pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengakui kesalahannya dan telah menjalani hukuman.
5. Sehat jasmani dan rohani: di buktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit yang ditunjuk.
6. Terdaftar sebagai pemilih: harus terdaftar dalam daftar pemilih di wilayah Provinsi tempat ia mencalonkan diri.
7. Dukungan minimal: harus mendapatkan dukungan minimal 2.000 hingga 5.000 orang pemilih yang tersebar di lebih dari 50% Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. Jumlah dukungan yang dibutuhkan tergantung pada jumlah penduduk di Provinsi tersebut.
8. Bukan anggota partai politik: calon anggota DPD tidak boleh menjadi anggota partai politik.
9. Mengundurkan diri dari jabatan tertentu: jika calon memegang jabatan tertentu di pemerintahan atau lembaga negara, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Selain syarat-syarat di atas, calon anggota DPD juga harus memenuhi berbagai persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat pendaftaran.¹⁴

Fenomena menarik dalam ajang pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berhasil memenangkan pemilihan umum legislatif Provinsi

¹⁴ KPU, "Syarat Calon Dan Pencalonan Anggota DPD Pemilu."

Jambi pada tahun 2024, pendatang baru seorang gadis cantik berhasil menempati urutan ke 2 (dua) perolehan suara hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jambi Tahun 2024 yaitu Ivanda Awalina Firdausi Sukandar yang merupakan putri dari H. Sukandar mantan Bupati Kabupaten Tebo 2 (dua) periode 2011-2016 dan 2017-2022, dan ibunya Saniatul Lativa Sukandar merupakan anggota DPR-RI 2 (dua) periode, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Adapun daftar nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD-RI terpilih daerah pemilihan Provinsi Jambi periode 2024-2029 sebagai berikut.¹⁵

Tabel 1.1
Daftar nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPD-RI terpilih Daerah pemilihan Provinsi Jambi periode 2024-2029.

No	Nama
1	Elviana
2	Ivanda Awalina Firdausi Sukandar
3	Sum indra
4	H. Abu Bakar Jamalia

Sumber: *komisi pemilihan umum republik indonesia (KPU RI)*

Ivanda Awalina Firdausi merupakan nama yang asing bagi masyarakat provinsi jambi, hanya saja nama H. Sukandar dan Saniatul Lativa sukandar yang cukup fenomenal di provinsi jambi terkhusus di kabupaten Tebo, Ayahnya merupakan mantan Bupati Kabupaten Tebo 2 (dua) periode, periode 2011-2016 dan periode 2017-2022 dan ibunya merupakan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dapil Jambi 2 (dua) periode, periode Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dapil Jambi pada tahun 2024 telah selesai di laksanakan, dan yang terpilih menjadi perwakilan Daerah Provinsi Jambi ada empat

¹⁵ Setyoko and Waluyo, "Strategi Politik Pasangan Sukandar-Hamdi Dalam Pemenangan Pemilukada Ulang Kabupaten Tebo."

(4) yaitu Elviana, Ivanda, M. Syukur, dan Sum Indra.¹⁶ Dari 18 (delapan belas) kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) tahun 2024 adapun kemenangan dan kekalahan yang diraih oleh kandidat/calon, sebagai berikut.

Tabel 1.2
perolehan ahasil kemenangan dan kekalahan yang diraih oleh
kandidat/calon

no	Nama Calon DPD RI	Keterangan
1	H. Abu Bakar Jamalia	Pergantian antar waktu (PAW)
2	Darmawan, S.E.	Kalah
3	Edi Endra, S.P.	Kalah
4	Dra. Hj. Elviana, M.si.	Menang
5	H. Erwan, S.E., M.SI.	Kalah
6	Hamid, S.sos.	Kalah
7	Heri Kusnadi , M.kom.	Kalah
8	Ivanda Awalina Firdausi sukandar	Menang
9	H. Lukman , S.pd., M.pd.	Kalah
10	M. Sum Indra, S.E., M.S.I	Menang
11	H. M. Sykur, S.H., M.H.	Mengundurkan diri, maju menjadi calon Bupati Merangin
12	H. Muhammad Nuh, S.ag.	Kalah
13	Musmulyadi, S.H.I.	Kalah
14	Petrus Hilman Dapot Tuah Purba	Kalah
15	Ria Mayang Sari, S.H., M.H.	Kalah
16	Rudi Artdiansyah, S,H.	Kalah
17	Sabat Nase Indallah Jais	Kalah
18	Walini, S.I.Kom.	Kalah

Sumber: komisi pemilihan umum Provinsi Jambi 2024

¹⁶ kpu jambi, "Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi."

Adapun hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Jambi tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Perolehan hasil kemenangan dan kekalahan yang diraih oleh kandidat/calon

No	Nama Calon DPR RI Provinsi Jambi	Perolehan suara
1	H. Abu Bakar Jamalia	140.945
2	Darmawan, S.E.	66.469
3	Edi Endra, S.P.	81.128
4	Dra. Hj. Elviana, M.si.	291.334
5	H. Erwan, S.E., M.SI.	63.491
6	Hamid, S.sos.	35.118
7	Heri Kusnadi , M.kom.	54.006
8	Ivanda Awalina Firdausi sukandar	272.892
9	H. Lukman , S.pd., M.pd.	81.131
10	M. Sum Indra, S.E., M.S.I	166.140
11	H. M. Sykur, S.H., M.H.	237.540
12	H. Muhammad Nuh, S.ag.	37.147
13	Musmulyadi, S.H.I.	19.769
14	Petrus Hilman Dapot Tuah Purba	90.197
15	Ria Mayang Sari, S.H., M.H.	108.484
16	Rudi Artdiansyah, S,H.	49.016
17	Sabat Nase Indallah Jais	15.216
18	Walini, S.I.Kom.	11.452

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Tahun 2024

Berdasarkan 2 (dua) data diatas dapat diartikan bahwa Ivanda Awalina Firdausi Sukandar berhasil memenangkan dan berhasil menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Jambi periode 2024-2029. Perolehan suara yang diperoleh dari 11 (sebelas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi Terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota , yaitu, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi,

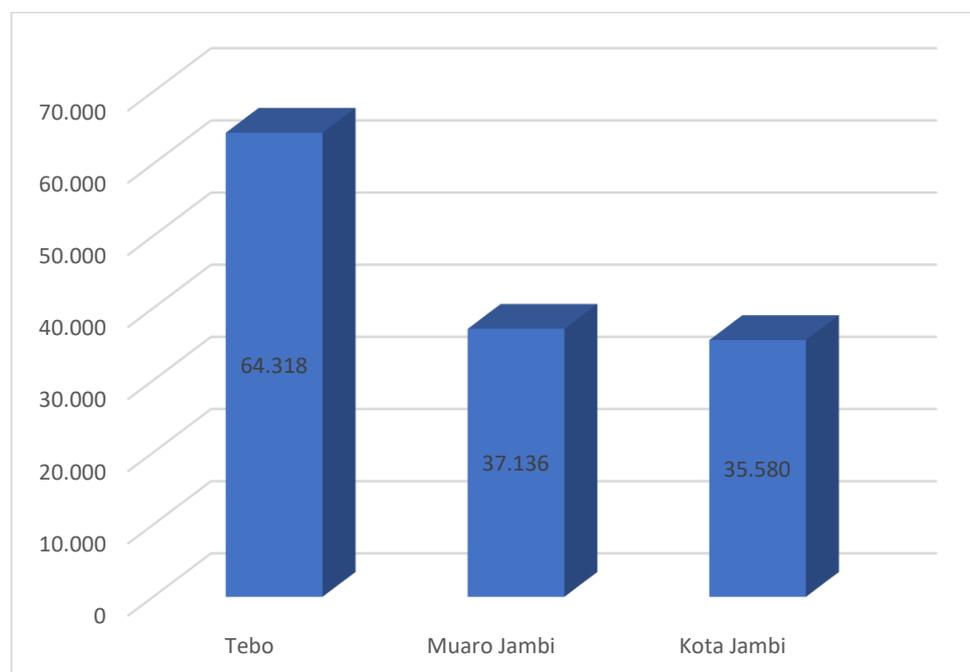
Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin. Dari perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di provinsi Jambi, suara tertinggi di dapatkan oleh Dra. Hj. Elviana, M.si. di posisi pertama, di posisi ke 2 (dua) ada Ivanda Awalina Firdausi Sukandar, Sum Indra, S.E., M.S.I. menempati peringkat 3 (tiga), dan di peringkat 4 (empat) diraih oleh H. Abu Bakar Jamalia.

Perolehan suara Ivanda Awalina Firdausi Sukandar pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yang signifikan di peroleh dari beberapa Kabupaten, yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. perolehan yang signifikan ini disebabkan Ivanda Sukandar memiliki modal sosial dan memiliki latar belakang keluarga figur tokoh politik, ayahnya yang merupakan mantan bupati 2 (dua) periode, periode 2011-2016 dan periode 2017-2022 Kabupaten Tebo, Dan ibunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dapil Jambi 2 (dua) periode, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 yang memiliki modal sosial yang kuat dan terbangun sejak lama di provinsi Jambi khususnya Kabupaten Tebo.

Dari figur yang dimiliki oleh keluarga Ivanda tersebut membuat modal sosial Ivanda sangat kuat dan hal itu mempermudah Ivanda Dekat dan mudah bersosialisasi dengan masyarakat Provinsi Jambi. Kedekatan tersebut membuat Ivanda dapat mengetahui keinginan dari masyarakat khususnya di daerah tempat ia tinggal. Masyarakat menginginkan adanya perhatian dari pemerintah pusat dalam segala bidang, dimana masyarakat beragapan masi kurangnya perhatian pemerintah

terhadap masyarakat daerah dalam beberapa bidang seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Melalui pemilihan perwakilan rakyat untuk ditingkat pusat yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tingkat pusat dan harapan masyarakat Jambi dapat tersampaikan aspirasinya melalui lembaga perwakilan Daerah ini.

Gambar. 1.
Kemenangan Ivanda di 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Jambi tahun 2024.



Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Tahun 2024

Pada data di atas diuraikan bahwa Ivanda unggul pada 3 (tiga) daerah kemenangan yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Kemenangan Ivanda Awalina Firdausi Suakandar tak terlepas dari kuasa politik yang dimiliki kedua orangtuanya, strategi politik dan marketing politik yang mana tim kemenangan berkerja keras menyusun strategi agar mendapat hasil sesuai apa yang diharapkan.

Acuan pertama yaitu penelitian oleh Rachim dan Abdullah (2017) yang berjudul Relasi Kuasa (Study Politik Transaksional Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif di Kota Makassar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Berpengaruh terhadap kedekatan aktor politik dengan sejumlah petinggi /penjabat daerah di kota Makassar, kedekatan ini nampak dalam pola hubungan sesama pengurus partai politik mengakibatkan adanya pola-pola kerja sama dalam hal menggunakan kekuasaan untuk memberikan pengaruhnya terhadap warga (voters) pola kedekatan ini juga nampak dari kedekatan aktor politik yang ingin memberikan pengaruhnya terhadap para warga sebagai bentuk dukungannya.

2. Membentuk tim kampanye yang didalamnya memiliki beberapa strategi-strategi dalam mempengaruhi para pemilih.

3. Jalan melakukan politik balas transaksional masi saja mewarnai ajang kontekstasi pencarian wakil rakyat dalam menuju kursi empuk dikedung parlemen rakyat, penyebab masi banyaknya didapat praktik-praktik transaksional dengan memberikan barang dan uang agar warga memilih calon anggota legislatif kepada mereka yang telah mendapatkan bantuan yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan calon anggota legislatif lainnya.¹⁷

Perbedaan temuan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian terdahulu difokuskan untuk mendeskripsikan politik transaksional dalam pemenagan pemilihan umum calon anggota legislatif 2017, sedangkan peneliti memfokuskan pada kemenangan Ivanda dalam pemilihan anggota DPD-RI

¹⁷ RACHIM, "Relasi Kuasa (Studi Politik Transaksional Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Di Kota Makassar)."

Provinsi Jambi Tahun 2024, pengaruh kekeluargaan. Yang mana ayahnya merupakan H. Sukandar mantan Bupati Kabupaten Tebo 2 (dua) periode dan ibunya merupakan mantan DPR-RI 2 (dua) Periode yaitu Saniatul Lathiva Saukandar.

Acuan kedua yaitu skripsi RELASI MODAL DAN KEKUASAAN (Studi Terhadap Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin – La Ntau dalam Perhelatan Pilkada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017) oleh ADI JONI berdasarkan hasil dan pembahasal peneliti, peneliti menemukan beberapa faktor penting dalam kasus penelitiannya yaitu:

1. Keterkaitan antara modal dan kekuasaan politik sangatlah erat. Modal tanpa kekuasaan politik, berarti kehilangan daya signifikasinya untuk memaksimalkan segala potensi untuk berdaulat. Sementara kekuasaan politik tak akan pernah dapat diraih tanpa adanya modal. Modal dalam politik yakni ekonomi, sosial, kultural, simbolik, semua jenis modal ini saling berhubungan dan menopong satu sama lain.
2. Dikarenkan kompleksitas permasalahan yang di dapati saat mengkonversikan modal dengan kekuasaan politik maka diperlukan sebuah kemampuan atau keterampilan kepemimpinan yang memadai. benar bahwa keberadaan modal yang satu dengan yang lain saling menopang tetapi dalam pemanfaatanya tidak semua menggunakan cara dan pendekatan yang sama. Harus disesuaikan dengan kebermanfaatan setiap jenis modal sehingga bisa diakui dan diterima dengan baik oleh masyarakat.¹⁸

¹⁸ Joni, "Relasi Modal Dan Kekuasaan Politik."

Perbedaan temuan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada keterkaitan modal dan kekuasaan yang menopong modal dalam politik seperti ekonomi, sosial, kultural, simbolik, sedangkan peneliti memfokuskan pada bagaimana pengaruh strategi politik dan faktor apa saja yang mempengaruhi ivanda dalam memengangkan pemilihan calon anggota DPD-RI Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai. **“RELASI KUASA KEMENANGAN IVANDA AWALINA FIRDAUSI SUKANDAR DALAM PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Relasi Kuasa terhadap kemenangan Ivanda dalam pemilihan DPD-RI Provinsi Jambi 2024?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memiliki beberapa tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana relasi kuasa dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2024

1.4 manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1 Secara Akademis

- a. penelitian ini di harapkan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasa yang relevan.
- b. Menjelaskan secara akademik mengenai bentuk relasi kuasa yang digunakan oleh Ivanda Awalina Firdausi Sukandar yang terpilih sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Provinsi Jambi tahun 2024.
- c. Menjadi salah satu sumber tertulis mengenai relasi kuasa dan kekuatan politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di provinsi Jambi

2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan kemajuan pemerintahan dan masyarakat.
- b. mampu membantu masyarakat umum menggali informasi seputar pemilu dan menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu mengenai fenomena-femnomena yang mungkin terjadi disaat pemilu.

1.5 Landasan Teori

Dalam menganalisis masalah yang ditemukan dilapangan, teori menjadi kunci yang penting bagi peneliti. Berikut adalah teori yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian:

1.5.1 Relasi kuasa

Teori relasi kuasa adalah konsep dalam ilmu sosial dan filsafat yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam hubungan antar individu, kelompok, atau institusi. Teori ini berfokus pada bagaimana kekuasaan tidak hanya dipegang oleh segelintir orang yang memiliki otoritas, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebar, diperuntukkan dan dipraktikkan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Michel Foucault seorang filsuf Prancis. Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif atau dipegang oleh negara atau otoritas tertentu, tetapi juga ada di mana-mana dan mengalir melalui interaksi sehari-hari. Menurut Michel Foucault kekuasaan dan pengetahuan saling terkait, dimana pengetahuan digunakan untuk menciptakan dan memelihara kekuasaan, dan sebaliknya, kekuasaan menciptakan dan mengontrol pengetahuan. Ini berarti kekuasaan tidak hanya digunakan untuk mengontrol, tetapi juga untuk membantu subjek, identitas, dan cara pandang.

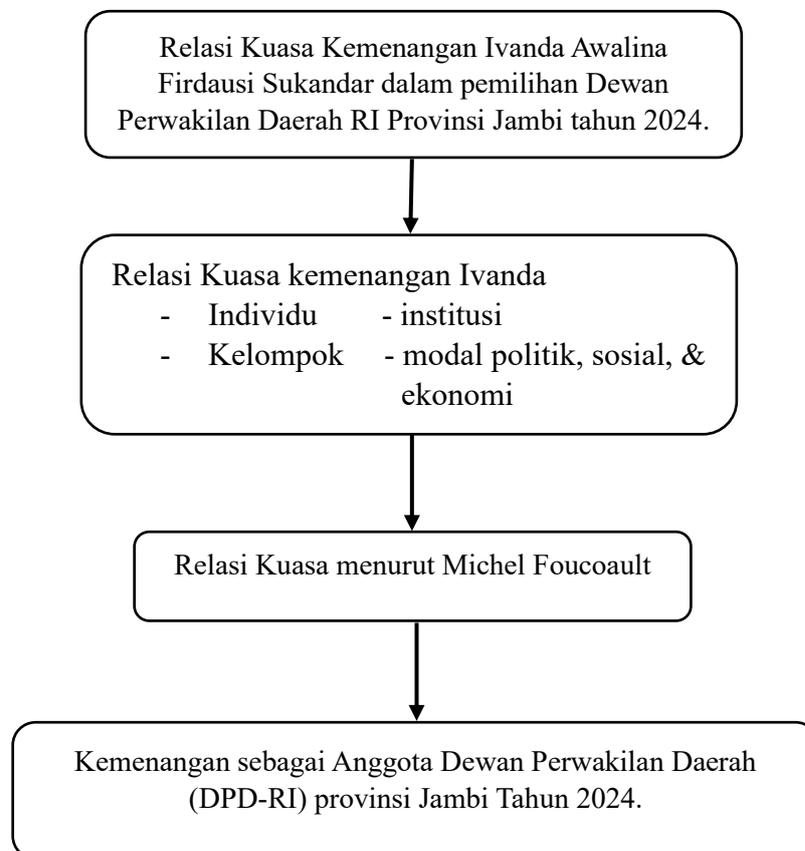
Teori relasi kuasa juga menekankan pentingnya resistensi, karena kekuasaan selalu menciptakan potensi perlawanan. dalam konteks sosial, misalnya, individu atau kelompok dapat menentang dan menantang struktur kekuasaan yang ada dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun simbolis. Secara umum teori relasi kuasa membantu kita memahami bagaimana kekuasaan bekerja di berbagai

level dan konteks, serta bagaimana hubungan kekuasaan dapat mempengaruhi struktur sosial, perilaku individu, dan proses politik.

1.6 Kerangka Berfikir

Polancik menjelaskan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu struktur diagramatis yang memiliki fungsi sebagai urutan logis sistematis dari tema yang akan dibahas. Menurut polancik kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan digunakan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian akan dihasilkan konsep-konsep yang saling terkait sehingga dapat menggambarkan jalannya penelitian secara sistematis. (qotrun 2022).

Gambar 2
Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, yang berupa Kumpulan metode untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu atau sekelompok orang.

Menurut Mayan dan Greenwood menjelaskan bahwa penelitian kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Pada dasarnya deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klarifikasi, deskripsi ini melambangkan tahap permulaan dari perkembangan suatu disiplin.

Digunakannya metode kualitatif dalam penelitian ini karena memberikan gambaran berupa beberapa perspektif teori yang dapat mendukung proses analisa yang lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Tidak hanya itu penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah aktual dan kemudian data dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis.

1.7.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada relevansi kelembagaan KPU dalam konteks kajian yang dilakukan. KPU merupakan Lembaga penyelenggaraan pemilu yang memiliki otoritas

penuh dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dalam penelitian ini KPU di pilih sebagai Lokasi penelitian karena memiliki data, dokumen, serta narasumber yang kredibel dan kompeten dalam bidang kepemiluaan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, focus didasarkan pada perolehan dari situasi sosial di lapangan, fokus penelitian ini adalah menganalisis Relasi kuasa Ivanda Awalina Firdausi Sukandar pada pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2024. Maka dimensi penelitian ini meliputi relasi kuasa dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hal yang melatarbelakangi Relasi Kuasa yang dimiliki Ivanda pada pemilu serentak 2024.

1.7.4 Sumber Data

a. Data primer

untuk mendapatkan data primer, dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara langsung yang di tujukan kepada informan dilokadsi penelitian dengan menggunakan Panduan atau pedoman wawancara. Wawancara dengan melakukan komunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan pada informan dengan mengacu pada panduan wawancara yang telah dirumuskan peneliti sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi pelaksanaan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dari buku-buku referensi, jurnal yang sesuai dengan objek kajian penelitian serta artikel ataupun berita yang terkait dengan ivanda.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Supaya data yang diperoleh oleh informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang memiliki jabatan (civic society) dan Masyarakat sekitar, seperti pada tabel berikut:

No	Keterangan	Informan	Alasan
2	Mantan Bupati Kabupaten tebo 2 (dua) periode,	H. Sukandar, S.Kom., M.SI.	Ayah dari Ivanda Awalina Firdausi Sukandar
3	Pengamat Politik	Drs. H. Navarin Karim, M.Si.	Akademisi dan pengamat politik provinsi Jambi
4	Tim Pemenangan	Nurul Hikmah.	Ketua pemenangan/tim sukses
5	Masyarakat/Pemilih Pemuda	Irham Nurfazri.	Pemilih muda putra asli Kabupaten Tebo
6	Masyarakat/pemilih pemudi	Lidwina Sagita	Pemilih muda kota jambi
7	Masyarakat/pemilih pemuda	Asep Supriadi	Pemilih muda Kabupaten Bungo

8	Masyarakat/Pemilih Pemudi	Siti Fatimah Ramadhan	Pemilih muda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9	Masyarakat/Pemilih Pemudi	Amalia Alfi	Pemilih muda Kabupaten Muaro Jambi

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

wawancara adalah proses mendapatkan data dan informasi melalui tanya jawab dengan mempertemukan kedua belah pihak secara langsung yaitu antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, atau responden, pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola, maupun pendapat-pendapat informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu yang bisa berupa teks, gambar, atau karya monumental individu. Contohnya adalah catatan seperti buku harian, Sejarah hidup, atau kebijakan. Juga gambar seperti foto atau sketsa. Serta karya seni seperti patung atau film. Dokumentasi adalah pelengkap untuk observasi dan wawancara mendalam penelitian kualitatif, (husaini usman 2009) dokumentasi dalam penelitian ini juga dapat berupa

dokumen resmi dan relevan dengan penelitian dapat berupa catatan gambar dan foto.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Bog dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Dalam analisis data yang berkualitas melibatkan rentang waktu dari awal hingga akhir pengumpulan data data. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan isi-isi, melakukan sintesa, Menyusun pola, memilih yang akan dipelajari, dan menarik Kesimpulan. Model tersebut mencakup tiga (3) Langkah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, Merujuk pada pemilihan informasi yang relevan dari hasil pengumpulan data. penyajian data, mengacu pada deskripsi data yang diperoleh selama pengumpulan data. penarikan Kesimpulan, merupakan tahap Dimana data atau informasi dianalisis untuk mencapai Kesimpulan penelitian.

1.7.8 Kebebasan Data/Trigulasi

Kebebasan data adalah validitas dari data dan informasi yang dihasilkan, dan Teknik pemerilsaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Trigulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Trigulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat pengumpulan dan analisis data. Dalam menguji kebebasan data peneliti melibatkan trigulasi perbandingan dan pengecekan Kembali kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai alat dan waktu dalam konteks metode kualitatif.